



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR *126/kep/2016*  
TENTANG  
PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 251 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58 );

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bupati/Walikota untuk segera menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah yang dibatalkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KETIGA : Bupati/Walikota bersama DPRD Kabupaten/Kota untuk mencabut Peraturan Daerah yang dibatalkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KEEMPAT : Dalam hal Bupati/Walikota dan/atau DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menerima Keputusan ini dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati/Walikota dan/atau DPRD Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari sejak Keputusan ini diterima.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 3 JUNI 2016



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- a. Menteri Dalam Negeri di Jakarta, sebagai laporan;
  - b. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - c. Bupati/Walikota di Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - d. Ketua DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 126 TAHUN 2016  
TENTANG PEMBATALAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN/KOTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG DIBATALKAN

1. Kota Yogyakarta

No.	Tahun	Nama Peraturan Daerah	Alasan Pembatalan
1.	1951	Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1951 tentang Tarif Pajak Kendaraan yang Tidak Bermotor	Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	1951	Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1951 tentang Sewa Menyewa Rumah Gedung-Gedung dan Lingkungan Kotapraja Yogyakarta	Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
3.	1952	Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1952 tentang Perubahan Tarip Pemasangan Reklame	Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
4.	1953	Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perubahan Pajak Kendaraan yang Tidak Bermotor (Pajak Sepeda) Dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta	Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	1953	Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1953 tentang Perubahan Biaya Pemeriksaan Daging	Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

No.	Tahun	Nama Peraturan Daerah	Alasan Pembatalan
		(Keurloon), Sewa Rumah Pemotongan dan Biaya Timbangan Hewan Hidup Sebelum Dipotong, (Pemotongan Babi) Dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta	
6.	1953	Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 12 Tahun 1953 tentang Sewaan Kios/Kedai Milik Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta	Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
7.	1957	Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1957 tentang Uang Sidang, Uang Jalan, Uang Penginapan, Uang Kehormatan dan Tunjangan Khusus Bagi Anggota-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Dewan Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta	Bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
8.	1957	Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1957 tentang Yayasan Kas Pembangunan Kotapraja Yogyakarta	Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

No.	Tahun	Nama Peraturan Daerah	Alasan Pembatalan
9.	1960	Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1960 tentang Pelaksanaan Pemberian Ijin Untuk Menjual Obat-Obatan Berdaya Keras Bagi Pedagang Kecil di Daerah Kotapraja Yogyakarta	Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
10.	1961	Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1961 tentang Penggantian Tarif Biaya Renang di Tempat Renang Umbang Tirta Yogyakarta tersebut dalam Lampiran 1 dari Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 2/Tahun 1954 Nomor 2/Tahun 1954	Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

## 2. Kabupaten Gunungkidul

No.	Tahun	Nama Peraturan Daerah	Alasan Pembatalan
1.	1970	Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gunungkidul Nomor 1 Tahun 1970 tentang Penetapan Peraturan Pajak Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gunungkidul Nomor 8 Tahun 1976 tentang	Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



No.	Tahun	Nama Peraturan Daerah	Alasan Pembatalan
		Perubahan Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1970	
2.	2006	Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 4 Seri E)	Bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
3.	2008	Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 04 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 06 Seri E)	Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

No.	Tahun	Nama Peraturan Daerah	Alasan Pembatalan
4.	2012	Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2012 tentang Izin Pemakaian Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 Nomor 10 Seri E)	Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5.	2014	Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2014 tentang Usaha Pertambangan Mineral (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 Nomor 2)	Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

### 3. Kabupaten Kulon Progo

No.	Tahun	Nama Peraturan Daerah	Alasan Pembatalan
1.	2002	Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2002 Nomor 2 Seri C)	Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

No.	Tahun	Nama Peraturan Daerah	Alasan Pembatalan
2.	2007	Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Perdagangan dan Retribusinya (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 1 Seri C)	Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3.	2007	Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perizinan Usaha Industri dan Retribusinya (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 2 Seri C)	Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
4.	2007	Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tanda Daftar Perusahaan dan Biaya Administrasinya (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 3 Seri C)	Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	2014	Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo	Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

No.	Tahun	Nama Peraturan Daerah	Alasan Pembatalan
		Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15)	Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

#### 4. Kabupaten Sleman

No.	Tahun	Nama Peraturan Daerah	Alasan Pembatalan
1.	1998	Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 4 Tahun 1998 tentang Retribusi Usaha Bengkel Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Tahun 1999 Nomor 2 Seri B)	Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	2003	Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kedudukan Keuangan Lurah dan Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2003 Nomor 9 Seri E)	Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3.	2004	Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perizinan di Bidang Usaha Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2004 Nomor 6 Seri C)	Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

No.	Tahun	Nama Peraturan Daerah	Alasan Pembatalan
4.	2013	Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2013 tentang Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013 Nomor 1 seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 68)	Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5.	2014	Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2014 Nomor 3 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 85)	Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

#### 5. Kabupaten Bantul

No.	Tahun	Nama Peraturan Daerah	Alasan Pembatalan
1.	2007	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 11 Tahun 2007)	Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

No.	Tahun	Nama Peraturan Daerah	Alasan Pembatalan
2.	2015	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 45)	Bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa


 GUBERNUR  
 DAERAH Istimewa YOGYAKARTA,  
  
 HAMENGKU BUWONO X 

